

KEPENTINGAN NASIONAL CHINA DALAM KERJA SAMA DENGAN DJIBOUTI

Bayu Anindito Adi Nugroho¹

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai persaingan geopolitik global China, sebagai kekuatan ekonomi baru, secara agresif telah memperluas pengaruhnya ke luar negeri termasuk di Afrika. Djibouti, dengan lokasinya yang strategis di Selat Bab-el-Mandeb, menjadi titik fokus investasi besar-besaran dari China dalam kerangka Belt and Road Initiative (BRI). Proyek infrastruktur masif, seperti pelabuhan dan zona perdagangan bebas, telah mengubah lanskap ekonomi Djibouti. Lebih jauh lagi, pembangunan pangkalan militer China di Djibouti menandai ambisi strategis Beijing untuk mengamankan jalur laut penting dan memperluas jangkauan pengaruhnya di kawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepentingan nasional Cina dalam kerjasama dengan Djibouti, sebuah negara kecil yang terletak di Tanduk Afrika. Kerja sama antara Tiongkok dan Djibouti telah meningkat secara signifikan selama dekade terakhir, dengan Cina berinvestasi besar-besaran di infrastruktur Djibouti, termasuk pelabuhan, bandara, dan pangkalan militer. Penelitian ini juga meneliti signifikansi militer dari kehadiran Tiongkok di Djibouti, khususnya pangkalan militernya, yang telah beroperasi sejak tahun 2017. Pangkalan itu Pangkalan militer ini dipandang sebagai komponen kunci dari strategi militer Tiongkok di Afrika, yang memungkinkan Tiongkok untuk memproyeksikan kekuatan dan pengaruhnya di wilayah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dimana hasilnya lebih menekankan pada makna, analisis datanya bersifat induktif yang kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengambil data sekunder (media buku, jurnal, dan sumber online). Kesimpulan dalam penelitian ini adalah kerja sama Tiongkok dengan Djibouti didorong oleh berbagai faktor, termasuk keinginannya untuk mengamankan pasokan energinya, memperluas pengaruh ekonominya di Afrika, dan meningkatkan posisi globalnya. Kerja sama ini juga dipandang sebagai kunci komponen utama dari BRI Tiongkok, yang bertujuan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan konektivitas di seluruh dunia.

Kata Kunci: Kepentingan Nasional, China, Kerja Sama, Djibouti

ABSTRACT

This research examines the global geopolitical competition. China, as an emerging economic power, has aggressively expanded its influence abroad including in Africa. Djibouti, with its strategic location on the Bab-el-Mandeb Strait, has become a focal point for massive Chinese investment under the Belt and Road Initiative (BRI). Massive infrastructure projects, such as ports and free trade zones, have transformed Djibouti's economic landscape. Furthermore, the construction of a Chinese military base in Djibouti marks Beijing's strategic ambition to secure important sea lanes and expand its sphere of influence in the region. This study aims to analyze China's national interests in cooperation with Djibouti, a small country located in the Horn of Africa. Cooperation between China and Djibouti has increased significantly over the past decade, with China investing heavily in Djibouti's infrastructure, including ports, airports, and military bases. The research also examines the military significance of China's presence in Djibouti, specifically its military base, which has been operational since 2017. The base is seen as a key component of China's military strategy in Africa, allowing China to project its power and influence in the region. The method used in this research is a qualitative method where the results emphasize more meaning and inductive data analysis, which is then constructed into hypotheses or theories. The data collection technique in this research uses secondary data (media books, journals, and online sources). The conclusion of this research is that China's cooperation with Djibouti is driven by various factors, including its desire to secure its energy supplies, expand its economic influence in Africa, and improve its global position. This cooperation is also

seen as a key component of China's BRI, which aims to promote economic development and connectivity around the world.

Keywords: National Interest, China, Cooperation, Djibouti

PENDAHULUAN

Dunia pada abad ke-21 ini sedang mengalami perubahan besar yang tak terlihat, dimana seiring dengan perkembangan globalisasi ekonomi, masyarakat informasi, serta diversifikasi budaya yang berkembang di dunia, menjadikan sistem dunia yang semakin multi kutub. Hal itu juga membuat perdamaian, pembangunan, dan kerja sama merupakan suatu instrumen bagi negara untuk mencapai kesejahteraan dalam memenuhi kepentingan nasionalnya. China merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional yang kini memiliki peran penting dalam tatanan global. Dimana pada beberapa tahun terakhir, China telah giat dalam pembangunan ekonomi dan memiliki pengaruh yang cukup besar di panggung global. Aspek politik, ekonomi, dan militer merupakan wilayah kerja China untuk menunjukkan ambisinya sebagai kekuatan adidaya baru.

Setelah tiga dekade pertumbuhan ekonomi, China mencapai tahap ekspansionis, dengan penurunan tingkat keuntungan, kelebihan kapasitas produksi, konsumsi dan kelangkaan sumber daya material. Hal ini dikarenakan perkembangan pesat industri manufaktur China dalam tiga puluh tahun terakhir. Semua ketidak seimbangan ini, membuat perusahaan China dengan dukungan pemerintah memutuskan untuk mencari peluang baru di luar negeri (Hussein, 2018). Untuk memenuhi kebutuhan akan sumber daya tersebut, China mulai berinvestasi di negara-negara Afrika yang strategis dan kaya akan sumber daya alam.

Afrika menjadi salah satu kawasan yang banyak didanai pembangunan infrastrukturnya oleh China. China mengejar kebijakan Afrika untuk waktu yang lama dan itu adalah salah satu dukungan strategis untuk negara-negara Afrika selama dekolonisasi (Hussein, 2018). Salah satu negara yang dianggap penting secara strategis oleh China adalah Djibouti. Djibouti memiliki lokasi strategis di selat Bab el Mandeb, sebuah titik utama antara Laut Merah dan Teluk Aden. China menjalin hubungan yang kuat dan membiayai pembangunan infrastruktur utama, seperti bandara, proyek air, pelabuhan, dan

zona perdagangan bebas. China menjalin hubungan resmi dengan Djibouti pada 1979, dua tahun setelah kemerdekaan negara itu dari kekuasaan Prancis (Castillejo, 2013). Pada awalnya, hubungan kedua negara tersebut memiliki ikatan ekonomi dan militer yang terbatas, namun dimulai pada akhir 2000-an, hubungan keamanan dan ekonomi mereka mulai berkembang. Hal ini juga ditandai dengan investasi-investasi China di negara kecil tersebut.

Kemudian, pada tahun 2000 terbentuknya suatu *Forum on China-Africa Cooperation* (FOCAC), yang juga menandai kesepakatan kerja sama formal China di kawasan tersebut (FOCAC, 2006). Bagian dari strategi baru China Afrika termasuk investasi infrastruktur yang signifikan yang meningkat dari USD 500 juta pada awal tahun 2000 menjadi USD 20,9 miliar pada tahun 2015. Tujuan yang dinyatakan China dalam proyek infrastruktur di Afrika adalah tidak hanya membantu negara tuan rumah untuk berintegrasi dengan ekonomi regional, tetapi juga memudahkan perdagangan dengan China dan seluruh dunia. Para pemimpin di konferensi FOCAC tahun 2006 mencatat bahwa "... infrastruktur yang terbelakang adalah salah satu hambatan yang menghambat pembangunan Afrika yang mandiri dan berkelanjutan.."

Djibouti adalah salah satu penerima proyek infrastruktur China tersebut, sebuah negara yang tidak dikenal dengan komoditas bernilai tinggi, tetapi diakui karena lokasinya yang strategis. Proyek infrastruktur utama China di Djibouti antara lain, proyek air, dua bandara internasional, proyek kereta api Addis Ababa -Djibouti, dan proyek Pelabuhan Multiguna Doraleh dengan total USD 2 miliar. Pelabuhan tersebut diharapkan menjadi salah satu pelabuhan dunia terbesar yang mampu menangani peti kemas, ternak, minyak dan fosfat.

Pelabuhan Djibouti juga dipilih untuk menjadi bagian dari apa yang disebut *Belt and Road Initiative* Presiden Xi untuk mengembangkan perdagangan dan infrastruktur terkait di sepanjang rute jalan sutra darat dan laut (Mitchell & Ehizuelen, n.d.). Laporan Dana Moneter Internasional (IMF) 2017 menyatakan bahwa proyek infrastruktur besar yang dimulai pada 2015, sebagian besar dibiayai oleh pinjaman dari lembaga. Keuangan yang didukung China telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Djibouti. Keterlibatan China di Djibouti adalah simbol dari pergeseran yang lebih luas menuju kebijakan luar negeri yang lebih ekspansif termasuk di Afrika, di

bawah Sekretaris Jenderal Partai Komunis China dan Presiden Negara Xi Jinping. Unsur politik dalam hadirnya China di Djibouti terlihat pada prestise yang didapatkan China atas pengaruhnya di kancah internasional. Kedekatannya dengan negara-negara di Afrika, khususnya Djibouti telah membawa negara tirai bambu tersebut ramah terhadap negara-negara dunia ketiga. Politik investasi menjadi cara China untuk mendapatkan pengaruh di Afrika. Dalam ekonomi politik, investasi hanya terjadi ketika aktor yakin mereka akan mendapatkan keuntungan (Weingast & Wittman, 2008). Ekonomi politik China dengan menggunakan investasi asing langsung sebagai metode mereka untuk mendapatkan pengaruh di Afrika menjadi salah satu topik besar pada dekade ini. *Foreign Direct Investment (FDI)* termasuk dalam proyek *Belt and Road Initiative*. Peningkatan FDI di Afrika terjadi setiap tahun. Hal ini menunjukkan betapa China tertarik untuk menjalin kerjasama dengan Afrika.

Dalam sudut pandang ekonomi politik, China sebagai aktor yang memiliki kekuatan untuk mengontrol kekayaan dan kebijakan untuk mengakumulasi modal mereka. Untuk menyebarkan kontrolnya, China sering menggunakan cara diplomatik atau politik untuk menghasilkan kekayaan. Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas, maka peneliti merasa perlu membuat suatu penelitian yang membahas tentang Kepentingan Nasional China dalam Kerja sama dengan Djibouti.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji tujuan dari motif-motif dalam perilaku dan faktor-faktor yang mendasari fenomena Kepentingan Nasional China dalam Kerjasama dengan Djibouti.

KERANGKA ANALITIK

Neorealisme

Pemikir kaum neorealis terkemuka, Kenneth Waltz dalam bukunya *Theory of International Politics* (1979) berupaya memberikan penjelasan ilmiah tentang sistem politik internasional (Griffiths, 2007). Ia mengambil beberapa elemen realis klasik dan

neoklasik sebagai titik awal – misalnya, negara-negara merdeka hidup dan bergerak dalam sistem anarki internasional. Dalam pandangan Waltz, teori hubungan internasional yang paling baik adalah teori yang memfokuskan pada struktur sistem, pada unit-unitnya yang berinteraksi, dan pada kesinambungan, serta pada perubahan sistem dalam realisme klasik, para pemimpin negara dan keputusan serta tindakan internasionalnya merupakan pusat perhatian. Kebalikannya, pada neorealisme, struktur sistem yang bersifat eksternal untuk aktor, terutama dalam distribusi kekuasaan relatif, adalah fokus analitis sentral. Struktur kurang lebih dapat menentukan tindakan.

Menurut teori kaum neorealis Waltz, bentuk dasar hubungan internasional adalah struktur anarki yang terdesentralisasi di antara negara-negara. Negara-negara serupa dalam semua hal fungsi dasarnya, yaitu disamping perbedaan budaya, atau ideologi, konstitusi, dan personal, mereka semua menjalankan tugas-tugas dasar yang sama. Semua negara harus mengumpulkan pajak, menjalankan kebijakan luar negeri, dan seterusnya (He, 2014).

Menurut pandangan kaum neorealisme, struktur dalam hubungan internasional memiliki peran penting yang dapat menjaga kestabilan kepentingan nasional setiap negara. Kaum neorealisme lebih bersikap objektif dan memandang dunia apa adanya bukan memandang dunia yang seharusnya dan sistem anarki merupakan tolak ukur perilaku yang selalu berpatokan pada kepentingan nasional. Sehingga, persaingan dalam suatu negara tetap menjadi domain utama yang tetap dipertahankan neorealis sebagai wujud untuk memenuhi kepentingan nasional. Kerjasama menurut pandangan neorealis, difokuskan pada pencapaian kepentingan nasional dengan power setiap negara.

Konsep kerjasama yang diterapkan oleh kaum neorealis adalah konsep yang relatif gains. Hal tersebut berarti bahwa masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu kerjasama akan mendapatkan keuntungan lebih daripada pihak lainnya sehingga keuntungan yang didapatkan oleh masing-masing pihak akan dirasa tidak sama rata atau relatif dari sudut pandang yang berbeda (Griffiths, 2007).

Kepentingan Nasional

Istilah kepentingan nasional telah digunakan oleh negarawan dan cendekiawan sejak berdirinya negara-bangsa untuk menggambarkan aspirasi dan tujuan entitas berdaulat di arena internasional. Saat ini para menteri luar negeri, ahli strategi militer, dan

akademisi mendiskusikan kepentingan vital negara mereka dengan cara yang menunjukkan bahwa setiap orang memahami dengan tepat apa yang mereka maksud dan akan menarik kesimpulan yang benar dari penggunaan istilah tersebut. Sebagian besar buku teks tentang hubungan internasional berisi definisi dan beberapa diskusi tentang kepentingan nasional (Griffiths, 2007). Beberapa sarjana telah menulis seluruh volume tentang masalah ini, di antaranya Charles Beard, Hans Morgenthau, Joseph Frankel dan Nuechterlein. Dalam bentuknya yang paling sederhana, kepentingan nasional adalah kebutuhan dan keinginan yang dirasakan dari satu negara berdaulat dalam kaitannya dengan negara berdaulat lainnya yang terdiri dari lingkungan eksternal.

Beberapa poin dalam definisi ini perlu dielaborasi. Pertama, kita berbicara tentang persepsi kebutuhan negara yang menunjukkan bahwa keputusan tentang apa yang menjadi kepentingan nasional adalah hasil dari proses politik di mana para pemimpin negara mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang apa itu kepentingan, tetapi akhirnya sampai pada kesimpulan tentang pentingnya masalah tertentu. Kedua, definisi ini berkaitan dengan negara berdaulat yang sepenuhnya independen, bukan dengan organisasi internasional atau wilayah yang bergantung karena, baik atau buruk, kita masih hidup di dunia di mana keputusan untuk menggunakan kekuatan, memberlakukan pembatasan perdagangan, untuk memasuki aliansi hanya dibuat oleh pemerintah negara-negara berdaulat. Ketiga, definisi ini membedakan antara lingkungan eksternal dan internal (domestik) negara, yang terakhir ini biasanya disebut sebagai kepentingan umum. Akhirnya, definisi ini menyiratkan bahwa kita berbicara tentang kepentingan negara-bangsa secara keseluruhan, bukan kepentingan kelompok swasta, birokrasi atau organisasi politik.

Kebijakan Luar Negeri

Secara konseptual, kebijakan luar negeri sering dipahami sebagai tindakan otoritatif yang diambil atau berkomitmen untuk diambil oleh pemerintah baik untuk mempertahankan aspek yang diinginkan dari lingkungan internasional atau untuk mengubah aspek yang tidak diinginkan. Ini diambil dengan perhitungan yang tepat dan orientasi tujuan yang jelas untuk memecahkan masalah atau mempromosikan beberapa perubahan di lingkungan internasional (Senadeera, 2023).

Holsti melihat kebijakan luar negeri sebagai kombinasi dari orientasi, peran nasional, tujuan, dan tindakan.

Sementara tiga komponen pertama (orientasi, peran nasional, tujuan) merupakan gambaran di benak pembuat kebijakan, sikap terhadap dunia luar, keputusan, dan aspirasi. Komponen keempat (tindakan) diambil untuk mempengaruhi orientasi tertentu, memenuhi peran, atau mencapai dan mempertahankan tujuan.

PEMBAHASAN

Politik Luar Negeri China

Seiring peran dan pengaruh China terhadap banyak negara di dunia semakin berkembang, dipandang perlu untuk memahami bagaimana perspektif China terhadap hubungan luar negerinya dengan negara lain dalam konstelasi politik global. Sejak didirikan pada tahun 1949, Republik Rakyat China selalu menunjukkan semangat internasionalisme dan kemanusiaan yang juga mendukung upaya negara berkembang lainnya untuk meningkatkan kehidupan rakyatnya dan mencapai pembangunan. Sejak awal berdiri, meskipun China sendiri kekurangan dana, ia mulai menawarkan bantuan kepada negara-negara yang membutuhkan dalam mendukung perjuangan mereka untuk kemerdekaan dan pembebasan nasional, dan upaya mereka untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial, yang meletakkan dasar yang kuat untuk hubungan jangka panjang, seperti persahabatan dan kerjasama dengan negara-negara tersebut. Setelah meluncurkan reformasi dan keterbukaan pada tahun 1978, China telah memberikan lebih banyak bantuan kepada ekonomi negara berkembang lainnya dalam bentuk yang lebih beragam untuk mendorong pembangunan bersama.

China memasuki era baru setelah Kongres Nasional Partai Komunis China (CPC) ke-18 pada tahun 2012. Presiden Xi Jinping telah mempertimbangkan tanggung jawab China dari perspektif global, dan mengusulkan visi komunitas global masa depan bersama dan Belt and Road Initiative.⁷⁰ China berkomitmen untuk mengejar kebaikan yang lebih besar dan kepentingan bersama, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip ketulusan, afinitas, dan itikad baik untuk mengembangkan hubungan dengan negara-negara berkembang lainnya dan prinsip-prinsip persahabatan, ketulusan, saling menguntungkan, dan inklusivitas untuk memperluas hubungan dengan negara tetangga.⁷¹ Untuk tujuan ini, Presiden Xi

telah memanfaatkan banyak kesempatan internasional besar untuk mengumumkan berbagai langkah kerja sama. Ini menyajikan pendekatan China, menawarkan visinya, dan menyumbangkan kekuatannya untuk menyelesaikan masalah pembangunan global dan mengimplementasikan Agenda PBB 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Menanggapi panggilan zaman, China telah meningkatkan bantuan luar negerinya menjadi model kerjasama pembangunan internasional, mengambil inisiatif baru dan mencapai hasil yang lebih besar di era baru ini.⁷² Pemerintah China menerbitkan buku putih ini untuk memperkenalkan pandangan China tentang kerja sama pembangunan internasional di era baru, tindakan yang telah diambil, dan rencananya untuk masa depan.

Lanskap strategis internasional sedang mengalami perubahan besar, dimana dinamika global telah menyebabkan kekuatan internasional semakin cepat, seperti; globalisasi ekonomi, masyarakat informasi dan diversifikasi budaya yang berkembang. Perubahan tersebut juga membawa kekuatan pasar negara semakin berkembang, serta konfigurasi kekuatan strategis menjadi lebih seimbang. Mengejar perdamaian, stabilitas dan pembangunan telah menjadi aspirasi universal masyarakat internasional dengan kekuatan perdamaian, namun, sistem dan ketertiban keamanan internasional dirusak oleh tumbuhnya hegemonisme, politik kekuasaan, unilateralisme dan konflik dan perang regional yang terus-menerus.

Pola atau Bentuk Kerja Sama (Sejalan dengan Politik Luar Negeri)

China mengejar dunia yang ideal, dimana segala bentuk kebijakan mengatur untuk kebaikan bersama, menghormati prinsip-prinsip bertetangga yang baik dan harmoni dalam hubungan dengan semua negara lain, dan menganjurkan kerja sama dan saling membantu. Berakar dalam dalam budaya China, keyakinan kuat inilah yang menginspirasi kerja sama pembangunan China. Menjunjung tinggi keyakinan bahwa semua negara adalah anggota negara global dengan masa depan bersama, China menganjurkan hubungan internasional yang lebih adil dan lebih stabil, dan dengan teguh berkontribusi pada pembangunan global.

Dalam *China's International Development Cooperation in the New Era*, disebut bahwa China adalah anggota pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga anggota tetap Dewan Keamanan PBB.⁸⁸ Ini menjunjung tinggi nilai-nilai universal kemanusiaan – perdamaian, pembangunan, kesetaraan, keadilan, demokrasi dan kebebasan – dan

berpegang pada jalur pembangunan yang damai, terbuka, kooperatif dan inklusif. China menganggapnya sebagai kewajiban untuk secara aktif terlibat dalam kerja sama pembangunan sebagai anggota komunitas internasional yang bertanggung jawab. China menganggapnya sebagai misi untuk berkontribusi lebih banyak pada kemanusiaan. Keinginannya adalah untuk menawarkan lebih banyak barang publik kepada komunitas internasional dan bergabung dengan negara lain untuk membangun masa depan bersama yang lebih baik.

China aktif sebagai peran kontributor dalam panggung ekonomi global, dimana pola kerjasama yang dibangun China berfokus terhadap kerjasama selatan-selatan (*South-South Cooperation*). Terlepas dari pencapaian luar biasa China, dua kenyataan tidak berubah: China berada di tahap utama sosialisme dan akan tetap demikian untuk waktu yang lama, dan China masih merupakan ekonomi berkembang terbesar di dunia. Kerjasama pembangunan China merupakan bentuk saling membantu antar negara berkembang. Ini termasuk dalam kategori kerja sama Selatan-Selatan. China adalah pendukung setia, peserta aktif, dan kontributor utama kerja sama Selatan-Selatan. Ini akan terus memikul tanggung jawab internasional yang sepadan dengan tingkat dan kapasitas pembangunannya, dan selanjutnya memperluas kerjasama Selatan-Selatan, untuk mempromosikan upaya bersama untuk pembangunan bersama.

Atas pola kerja sama *South-South Cooperation* yang termasuk dalam fokus pola kerjasama China, *Belt and Road Initiative* adalah platform utamanya. Sabuk Ekonomi Jalur Sutra dan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 adalah barang publik penting yang ditawarkan China ke seluruh dunia dan platform utama untuk kerja sama pembangunan internasional. China telah bergandengan tangan dengan negara-negara lain untuk mempromosikan kebijakan, infrastruktur, perdagangan, keuangan dan konektivitas antar masyarakat, untuk membangun Sabuk dan Jalan menuju jalan menuju perdamaian, kemakmuran, keterbukaan, inovasi, pembangunan hijau, pertukaran budaya, dan pemerintahan yang bersih. Tidak hanya itu, China pun aktif dalam pembentukan kemitraan dengan negara-negara, yang mana hal tersebut sejalan dengan prinsip *Sustainable Development Goals* yang merupakan agenda resmi dari PBB untuk tujuan berkelanjutan 2030. sumber daya di sebagian besar perekonomian. Tujuan utama pemerintah China adalah membuat ekonomi nya relatif mandiri. Perdagangan luar negeri

pada umumnya terbatas untuk mendapatkan barang-barang yang tidak dapat dibuat atau diperoleh di China. Kebijakan semacam itu menyebabkan distorsi dalam perekonomian, karena sebagian besar aspek ekonomi dikelola dan dijalankan oleh pemerintah pusat, tidak ada mekanisme pasar untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan dengan demikian hanya ada sedikit insentif bagi pekerja, dan petani.

Kekuatan Ekonomi China

Sebelum tahun 1979, China di bawah kepemimpinan Mao Zedong mempertahankan ekonomi yang direncanakan secara terpusat, di mana Sebagian besar hasil ekonomi diarahkan dan dikendalikan oleh negara, yang menetapkan tujuan produksi, mengendalikan harga, dan mengalokasikan

Pada tahun 1978, di bawah pemerintah Deng Xiaoping, pemerintah China memutuskan untuk mengikuti kebijakan ekonomi Soviet dengan secara bertahap mereformasi ekonomi sesuai dengan prinsip pasar bebas dan membuka perdagangan dan investasi dengan barat. Mulai 1979, China mulai melakukan beberapa reformasi ekonomi. Pemerintah pusat memprakarsai insentif harga dan kepemilikan bagi para petani, yang memungkinkan mereka menjual sebagian hasil panen mereka di pasar bebas.

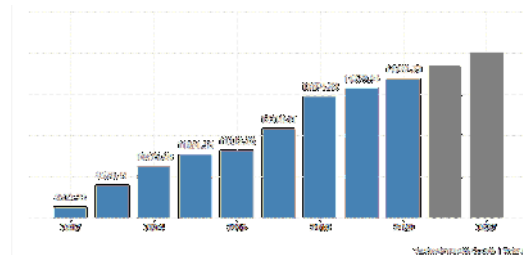
Sejak diperkenalkan reformasi ekonomi, ekonomi China telah tumbuh jauh lebih cepat, dari 1979 hingga 2018, PDB riil tahunan China rata-rata 9,5%, ini berarti bahwa rata-rata China mampu melipatgandakan ukuran ekonominya secara riil setiap delapan tahun. Para ekonom umumnya mengaitkan sebagian besar pertumbuhan ekonomi China yang cepat dengan dua faktor utama: Investasi modal skala besar dan pertumbuhan produktivitas yang cepat. Menurut Bank Dunia, China berubah dari ekonomi berpenghasilan rendah menjadi ekonomi berpenghasilan menengah ke bawah pada tahun 1997, dan pada tahun 2010, menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas.

Pemerintah China memproyeksikan bahwa China dapat melewati ambang pendapatan tinggi pada tahun 2025. Pemerintah China berharap untuk mencapai hal ini sebagian besar dengan menjadikan inovasi sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi pada masa depan. Reformasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan dan investasi telah membantu mengubah China menjadi kekuatan perdagangan utama. Ekspor barang

dagangan China naik dari \$ 14 miliar pada 1979 menjadi \$ 2,5 triliun pada 2018, sementara impor barang dagangan tumbuh dari \$ 18 miliar menjadi \$ 2,1 triliun.

Gambar China's Gross Domestic Product (GDP)

Sumber: Trading Economics (2020)



Pemerintah China memproyeksikan bahwa China dapat melewati ambang pendapatan tinggi pada tahun 2025. Pemerintah China berharap untuk mencapai hal ini sebagian besar dengan menjadikan inovasi sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi pada masa depan. Reformasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan dan investasi telah membantu mengubah China menjadi kekuatan perdagangan utama. Ekspor barang dagangan China naik dari \$ 14 miliar pada 1979 menjadi \$ 2,5 triliun pada 2018, sementara impor barang dagangan tumbuh dari \$ 18 miliar menjadi \$ 2,1 triliun.

Tabel China's Major Merchandise Trading Partners in 2018

Country	Total Trade	Chinese Exports	Chinese Imports	China's Trade Balance
European Union	681	408	273	135
United States	631	477	154	323
ASEAN	575	318	257	61
Japan	327	147	180	-33
South Korea	313	109	204	-95
Hong Kong	310	302	8	294
Taiwan	225	48	177	-129

Sumber: China's Custom Administration (2018)

Arus perdagangan China yang berkembang pesat telah menjadikannya mitra dagang yang semakin penting (dan seringkali terbesar) bagi banyak negara pada Tabel 4, mencantumkan data perdagangan resmi China pada tujuh mitra dagang terbesarnya pada tahun 2018 (berdasarkan total perdagangan). Ini termasuk 28 negara yang tergabung dalam Uni Eropa (EU28), Amerika Serikat, 10 negara yang tergabung dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, dan Taiwan. Tiga pasar ekspor teratas China adalah Amerika Serikat, EU28, ASEAN, sedangkan sumber impor utamanya adalah EU28, ASEAN dan Korea Selatan. China terus meningkatkan skala kerja sama pembangunan internasionalnya secara stabil, dengan

memberikan prioritas tinggi kepada negara-negara kurang berkembang di Asia dan Afrika dan negara-negara berkembang yang berpartisipasi dalam *Belt And Road Initiative*. Untuk beradaptasi dengan perubahan situasi domestik dan internasional, China telah mereformasi sistem manajemennya dan mencari cara baru untuk mempromosikan kerjasama pembangunan internasional dengan hasil yang lebih baik.

Geostrategi Djibouti dan Geopolitik China di Tanduk Afrika

Menurut Grygiel & Jakub, geostrategi adalah arah kebijakan luar negeri suatu negara. Ini menggambarkan di mana suatu negara memusatkan upayanya dengan memproyeksikan kekuatan militer dan mengarahkan kegiatan diplomatik karena faktor geografis, faktor geopolitik, alasan ideologis, kelompok kepentingan, atau sekadar keinginan para pemimpinnya. Jika dilihat dari pengertian yang disebutkan Grygiel & Jakub, geostrategi Djibouti secara tidak langsung digunakan pemerintah nya sebagai pendukung atas foreign policy nya, yang mana dipusatkan terhadap kepentingan ekonomi negara.

Merujuk pada pendapat Grygiel juga mengatakan, bahwa perubahan dalam komponen geografi sangat lambat; sedangkan perubahan geopolitik lebih cepat. Namun, perubahan dalam masalah geostrategis jauh lebih cepat dan mungkin terjadi dalam beberapa minggu atau bulan. Maksud dari pembahasan tersebut adalah, dimana perubahan geopolitik memiliki dampak langsung dan tidak langsung pada konteks geostrategis, dan mungkin mendorong ke arah perubahan geostrategis. Contohnya, seperti ketersediaan energi China dalam memenuhi kebutuhan dalam negerinya.

Grygiel juga mengatakan geostrategis terkait dengan: (1) strategi, meliputi: kehadiran militer, proyeksi kekuatan militer, perencanaan strategis, pengamanan aset militer, kapal perang, pangkalan/pangkalan militer; (2) tujuan nasional dan sarana untuk mencapai tujuan; (3) kebijakan luar negeri (upaya politik dan militer, kegiatan diplomatik) dan pandangan ke luar; (4) pertimbangan faktor geografis terhadap politik (posisi strategis, jalur komunikasi, kekuatan sumber daya regional); (5) pola dari mengubah; (6) bersifat agresif ofensif; dan (7) subbidang geopolitik. Dalam hal ini, geostrategi Djibouti juga diartikan sebagai faktor yang terkait atas posisi strategis negara yang terletak pada *chokepoint*.

Tantangan dan Ancaman Keamanan China di Tanduk Afrika

Kehadiran China yang berkembang di Djibouti telah memberikan perhatian yang belum pernah terjadi sebelumnya pada negara pelabuhan Afrika yang kurang dikenal dan menjadikannya batu ujian dalam perdebatan mengenai tujuan global Beijing yang berkembang. Pada tahun 2017, Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) membuka pangkalan militer luar negeri pertamanya di sana, di mulut Laut Merah, melanggar kebijakan lama yang melarang penempatan pasukan China di luar negeri. Fasilitas Angkatan Laut PLA yang baru tidak hanya menghadap ke chokepoint strategis utama dan salah satu jalur pelayaran yang paling banyak diperdagangkan di dunia, tetapi juga pangkalan militer utama AS, dimana hanya enam mil jauhnya. Kedatangan PLA telah memicu perdebatan baru tentang evolusi doktrin militer China, pengembangan kekuatan laut, dan kemampuan ekspedisi. Tapi itu juga membawa perhatian baru pada investasi ekonomi Beijing di kawasan Laut Merah, yang mendahului pangkalan itu lebih dari satu dekade. Kombinasi ekspansi komersial dan strategis China telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan keamanan nasional AS dan menyoroti Laut Merah sebagai teater potensial persaingan kekuatan besar.

Wilayah Djibouti panas, kering, dan memiliki sedikit sumber daya alam, tetapi lokasinya yang strategis dan kompleks pelabuhan laut dalam telah menarik tidak hanya militer Amerika dan China, tetapi juga Prancis, Jepang, Italia, dan Spanyol — serta minat dari Rusia, India, dan Arab Saudi. Djibouti adalah rumah bagi satu juta warga, wilayahnya seukuran Vermont, dan PDB-nya, sebesar \$3 miliar per tahun, setara dengan output China setiap dua jam. Asimetri antara kedua negara sulit untuk dilebih-lebihkan, dan kombinasi proyek infrastruktur besar-besaran dan kewajiban utang besar telah menimbulkan kegelisahan yang akrab tentang pengaruh China yang terlalu besar atas aset dan pengambilan keputusan Djibouti, memicu putaran debat lain atas apa yang disebut diplomasi "jebakan utang". Amerika Serikat telah memandang Djibouti dan Tanduk Afrika terutama melalui prisma keamanan, sementara prisma Beijing sebagian besar adalah "pembangunan."

Elit Djibouti percaya keuangan, teknologi, dan volume perdagangan China tidak hanya dapat mendorong negara mereka menjadi "Singapura Afrika", tetapi juga mempercepat pertumbuhan dan integrasi di seluruh wilayah yang sangat terbelakang.

Tetapi orang-orang yang skeptis melihat Djibouti dan tetangganya sebagai outlet yang rentan untuk kelebihan kapasitas produksi domestik China. Mereka juga khawatir Djibouti, seperti penerima bantuan China lainnya, mungkin gagal membayar utangnya dan dipaksa untuk membuat konsesi ke Beijing, suatu urutan yang dapat mengancam kepentingan vital AS di kawasan itu.

Kebangkitan China menghadirkan tantangan bagi Amerika Serikat dan tatanan internasional yang telah lama dipimpinnya. Sementara sikap AS terhadap Beijing telah berubah selama beberapa waktu. Afrika, hingga beberapa tahun terakhir, dilihat sebagai domain dengan konsekuensi strategis marginal dan tempat di mana diplomat AS dan China mungkin menemukan ruang untuk bekerja sama. Kedua belah pihak mengeksplorasi peluang melalui “Sub-Dialog Strategis dan Ekonomi AS-China tentang Afrika”, yang diadakan tujuh kali antara tahun 2005 dan 2016, serta melalui berbagai inisiatif “Track II”. Pada tahun 2018, Penasihat Keamanan Nasional AS, John Bolton, meluncurkan strategi Afrika yang baru. Mengutip kekhawatiran tentang jebakan utang, akuisisi pelabuhan, dan perilaku militer yang jahat, Bolton memusatkan perhatian pada jangkauan Beijing yang berkembang di Djibouti, Tanduk, dan Laut Merah.

Djibouti telah disebut sebagai “titik nyala” dalam persaingan strategis yang muncul dan berkembang antara Amerika Serikat dan China. Kekuatan strategis China di benua itu terutama berasal dari kekuatan ekonominya, termasuk di Djibouti, di mana Beijing telah memberikan pinjaman dan investasi untuk mendanai program infrastruktur sebagai bagian dari Jalur Sutra Digitalnya. Untuk bagiannya, Amerika Serikat telah difokuskan secara ekstensif pada transisi dari peningkatan hubungan pertahanan ke peningkatan hubungan geostrategis di negara tersebut.

Hal lain yang diperdebatkan adalah penggunaan teknologi, khususnya infrastruktur transfer data, untuk mendapatkan pengaruh di negara ini. Raksasa China Huawei dan anak perusahaannya sedang membangun kabel serat optik bawah laut yang dirancang untuk mengirimkan data dari Djibouti ke Pakistan dan sekitarnya. Selanjutnya, perkembangan ini telah memberdayakan presiden Djibouti, Ismail Omar Guelleh, untuk memperoleh konsesi dan imbalan yang cukup besar dari kekuatan besar yang beroperasi di wilayah tersebut.

Keterlibatan China di Djibouti sebagai Implementasi Kepentingan Pertahanan (Defense Interest)

Dalam *Defense White Paper China* yang diterbitkan dari awal 1998 sampai dengan 2019, kepentingan China yang terlihat nyata adalah Kedaulatan negara, Keamanan negara, Integritas Teritorial, Pembangunan Ekonomi dan Reunifikasi nasional. Buku Putih Pertahanan China 2015 secara resmi mengakui ambisi China terhadap lautan terbuka. Menurut seorang pejabat senior militer China, itu mencerminkan fakta bahwa "China telah menjadikannya tujuan strategis untuk menjadi kekuatan maritim, oleh karena itu, China perlu membangun angkatan laut yang kuat di mana Pertahanan perairan lepas pantai saja tidak dapat lagi memberikan pertahanan yang efektif bagi kepentingan maritim negara." Dokumen tersebut juga menyoroti niat untuk mempertahankan "pertahanan aktif" untuk mencapai "impian China tentang peremajaan bangsa," atau biasa disebut sebagai *Chinese dreams*, sebuah metafora untuk kebangkitan kembali China sebagai negara kaya dan kekuatan global.

Saat China mengembangkan kehadiran ekonomi dan politik yang kuat di panggung global, China juga berusaha mengembangkan kehadiran militer yang sesuai. Pada Agustus 2017, China membuka pangkalan militer luar negeri pertamanya di Djibouti, menandakan perubahan mendasar dalam kebijakan luar negeri dan keamanan Beijing. Selama dua dekade terakhir, pemerintah China mengambil pendekatan yang semakin fleksibel terhadap prinsip non-interferensi tradisionalnya karena kepentingan luar negerinya telah berkembang. Dengan keterlibatan ekonominya yang semakin dalam di Afrika, China menyadari kesulitan dalam menjaga jarak negaranya atas konflik regional dengan masalah ekonomi dan politik yang saling terkait. Sebagai tanggapan, China menjadi lebih bersedia untuk melakukan intervensi militer di Afrika untuk beradaptasi dengan ancaman regional seperti pembajakan, terorisme, dan perang saudara.

Pada tahun 2009, pengerahan ekspedisi pertama Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China (PLAN) dilakukan untuk melawan pembajakan di lepas pantai Somalia di Teluk Aden. Keterlibatan China di wilayah Afrika dan Samudra Hindia berkembang lebih jauh melalui perannya dalam misi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bantuan kemanusiaan serta pertumbuhan ekonomi yang tumbuh di wilayah ini. Pangkalan angkatan laut di Djibouti menandakan kehadiran militer China

yang meningkat di Afrika dan sekuritisasi tegasnya atas Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) Xi Jinping. Meskipun China berpendapat bahwa Djibouti adalah fasilitas logistik yang terutama digunakan untuk kegiatan non-militer, pangkalan ini dianggap sebagai pangkalan militer luar negeri China pertama yang digunakan untuk melindungi kepentingan China di luar negeri.

Keterlibatan China di Djibouti sebagai Implementasi Kepentingan Ekonomi (Economic Interest)

Djibouti yang merupakan ujung tombak wilayah Tanduk Afrika merupakan negara dengan luas permukaan terkecil di benua Afrika. Namun, kedekatannya dengan kawasan Timur Tengah, lokasinya di Selat Bab-el Mandeb, dan pentingnya jalur lintas energi membawa negara ini ke titik penting di mata negara-negara besar. China merupakan salah satu negara yang peduli dan berinvestasi di negara Tanduk Afrika tersebut.

Hubungan China-Djibouti harus dikaji dalam konteks kepentingan ekonomi dan kebijakan pemerintah Beijing. Mempertimbangkan hubungan China dengan Djibouti, dapat dikatakan bahwa Proyek *Belt-Road* memiliki efek percepatan dalam perjalanan hubungan. Djibouti dipandang sebagai pusat komersial oleh Beijing karena investasi luar negeri China dan kepentingan ekonomi di benua Afrika, hal inilah yang menjadi salah satu alasan China untuk bekerjasama dengan Djibouti.

Menurut Hal Brands, Djibouti memimpin geografi strategis utama karena berada di persimpangan tiga wilayah penting. Itu terlihat di seberang Bab el- Mandeb — selat Laut Merah yang merupakan saluran untuk mungkin 20% perdagangan dunia — di Semenanjung Arab dan Timur Tengah. Ini menandai ujung barat teater Indo-Pasifik yang luas dan itu berfungsi sebagai pintu gerbang tidak hanya ke Ethiopia yang terkurung daratan, pembangkit tenaga regional, tetapi juga ke benua Afrika yang lebih besar di mana Beijing telah membuat langkah strategis yang besar. Pada pernyataan tersebut, dapat diasumsikan bahwa lintasan keterlibatan China di Afrika selama dua dekade terakhir sangat luar biasa. Beijing melompati Washington sebagai mitra dagang utama Afrika dalam 2009 dan tidak menoleh ke belakang.

Brands juga mengatakan, bahwa pinjaman dan investasi China telah mendanai program infrastruktur di seluruh benua. Sebagai bagian dari apa yang disebut Jalur Sutra

Digital, Beijing memasarkan teknologi pengawasan canggih dan proyek “kota aman”. Bagi China, Afrika adalah banyak hal sekaligus: pasar dan sumber bahan mentah, hadiah dalam perjuangan global untuk pengaruh geo-ekonomi, sumber dukungan diplomatik di forum internasional, dan ujung tombak upaya jangka panjang untuk memproyeksikan kekuatan militer jauh melampaui Asia Timur.

Tabel Large-Scale Infrastructure Debt

Project	Dates of Construction	Financing	Construction Entity	Loan Terms	Total Cost of Project (USD)	Loan Amount (USD)
Doraleh Multipurpose Port	2014-2017	Export-Import Bank of China	China State Construction Engineering Corp.	2016 20 year maturity 2% interest rate 5-year grace period	\$580 million	\$344 million
Ethiopia Djibouti railway (Djibouti section)	2012-2016	Export-Import Bank of China	China Railway Construction Corporation	Initial terms 2013 20 year maturity, 3% fixed interest+ LIBOR Restructured: 2019 30-year maturity 2.1% fixed interest+ LIBOR	\$595 million	\$492 million
Ethiopia Djibouti water pipeline	2015-2017	Export-Import Bank of China	CGC Overseas Construction Co. Ltd. (OCCOC)	2013 20 year maturity 2% interest rate 5-year grace period	\$339 million	\$322 million
Totals					\$1.51 billion	\$1.16 billion

Sumber: Global China-Assessing China’s Growing Role in the World (2017)

Keterlibatan China di Djibouti sebagai Implementasi kepentingan Ideologi (Ideological Interests)

Ketika kebutuhan negara berubah, setiap pemimpin partai memiliki pemikirannya sendiri tentang bagaimana menafsirkan ajaran para pendahulu dan mengembangkan yang baru. Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao dan sekretaris jenderal saat ini Xi Jinping masing-masing memimpin salah satu dari “lima generasi pemimpin” China, dan semuanya mengembangkan doktrin yang khas dan komprehensif yang telah diabadikan dalam piagam partai.

Jika tiga dekade pertama sejak revolusi komunis membentuk era Mao Zedong, dan babak kedua adalah era Deng Xiaoping, China sekarang di ambang menyatakan ini era Xi Jinping. Para pemimpin Cina sebelumnya telah datang dengan ideologi politik mereka sendiri yang telah dimasukkan ke dalam konstitusi atau pemikiran partai. Bagaimana ideologi-ideologi ini dinamai mencerminkan pentingnya para pemimpin dalam partai.

Keterlibatan China di Djibouti sebagai Impelementasi Kepentingan Tata Dunia (World Order Interests)

Tidak lagi diperdebatkan bahwa tatanan dunia liberal telah mengalami transformasi yang mendalam, perubahan tatanan dunia baru menjadi konsekuensi dari kerusakan multilateral, sistem berbasis aturan dan melemahnya organisasi internasional serta pengabaian komitmen negara dalam rezim internasional. China memainkan peran aktif di

panggung global, kemajuan China sebagai negara rising power telah mampu membawa perubahan pada strategi kebijakan luar negeri Beijing. Seiring dengan pergeseran kekuatan global dan difusi kekuatan yang menuntut bentuk kerjasama sebagai aspek penting dalam pembangunan, maka China memperluas sayap nya dengan membentuk kemitraan dengan beberapa negara sebagai respon atas pemenuhan kepentingan nasional negara.

Konsep 'kemitraan' muncul dalam diplomasi China setelah berakhirnya Perang Dingin. China menjalin kemitraan strategis pertamanya dengan Brazil pada tahun 1993. Sejak itu, membangun kemitraan strategis telah menjadi salah satu dimensi terpenting dalam diplomasi China. Misalnya, China membangun 'kemitraan strategis kesetaraan, saling percaya dan koordinasi timbal balik di abad ke-21' dengan Rusia pada tahun 1996; 'kemitraan kolaboratif untuk abad ke-21' dengan Korea Selatan pada tahun 1998; dan 'kemitraan strategis dan kooperatif untuk perdamaian dan kemakmuran' dengan India pada tahun 2005. Pada 2014 China menjalin hampir 70 kemitraan strategis, yang mana menciptakan jaringan tautan strategis yang benar-benar berada dengan kekuatan besar. China tidak hanya menjalin kemitraan strategis dengan negara-negara namun juga dengan organisasi internasional seperti *Eropean Union* (UE), *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), *African Union* (AU), *Arab League* (AL), dan *The Community of Latin American and Caribbean States* (CELAC).

Dampak globalisasi yang semakin berkembang menggarisbawahi pentingnya menegakkan aturan dan prinsip internasional yang mengatur akses negara atas hubungan kerjasama internasional. Akhirnya, kekuatan-kekuatan yang muncul mulai bercita-cita menjadi bagian dari komunitas dunia dan mempengaruhi tatanan dunia baru yang sedang berkembang. Menurut Anna Michalski, kemitraan strategis telah didefinisikan Sebagai bentuk khusus dari keterlibatan bilateral antara dua aktor dalam sistem internasional dengan tujuan menciptakan hubungan bilateral yang sempurna. Ketika dibentuk antara negara dan aktor non-negara, kemitraan ini mengandung sejumlah tujuan yang tidak saling eksklusif, seperti mencapai tujuan kebijakan luar negeri material atau non-material, membentuk lingkungan internasional melalui proyeksi norma dan pandangan dunia, serta realisasi tujuan yang terkait dengan posisi internasional para aktor dengan meningkatkan status dan reputasi internasional mereka. Chinese Dreams

Chinese Dream adalah visi integratif dan transformatif Presiden Xi Jinping untuk China, sebuah prinsip pemersatu menyeluruh bagi rakyat China. Untuk memperingati ulang tahun pertama Xi yang memproklamirkan Impian China sebagai "peremajaan besar bangsa China", sebuah forum yang disebut "Dialog Internasional tentang Impian China" diadakan di Shanghai. Forum tersebut mempertemukan para cendekiawan dan pejabat dari China dan luar negeri untuk membahas Impian China: apa itu, apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya.

Merujuk terhadap jurnal yang ditulis Chai tersebut, dikatakan bahwa Para pemimpin China sejak kesuksesan revolusi Mao Zedong, untuk mendirikan Republik Rakyat China pada tahun 1949 tidak pernah sekalipun menggunakan istilah "mimpi" sebagai pedoman kebijakan. Semua kader dan warga diajarkan untuk mengikuti dan mematuhi ideologi seperti Marxisme Leninisme atau Pemikiran Mao Zedong sebagai masyarakat China. Setelah kematian Mao, Deng Xiaoping mengubah ideologinya menjadi "sosialisme dengan karakteristik China" dan penerus Deng, Jiang Zemin, lebih jauh memodifikasi ideologinya untuk memasukkan "Tiga Perwakilan", yang pada dasarnya memungkinkan kapitalis untuk bergabung dengan Partai dan dengan demikian menerima sanksi resminya. Namun, semua kebijakan tetap mengikuti rencana lima tahun pemerintah pusat. Tidak ada "mimpi" yang disinggung apalagi disetujui secara resmi, orang-orang ini disuruh bekerja, belajar, tetapi tidak pernah bermimpi.

Peneliti berasumsi bahwa, dalam prospek global, *Chinese Dream* akan mengubah lanskap global, yang dibentuk oleh negara-negara Barat selama dua abad terakhir selama industrialisasi. Lanskap global baru akan dibentuk melalui aturan dan pengalaman internasional baik dari negara maju maupun negara berkembang. Chinese Dream adalah mimpi untuk perdamaian, pembangunan, kerjasama dan saling menguntungkan bagi semua. Hal ini terkait dengan mimpi China terhadap perubahan yang mana akan memiliki manfaat terutama bagi masyarakat China. Impian China tidak hanya akan bermanfaat bagi orang-orang China, tetapi juga orang-orang dari semua negara di dunia.

Pertama, 'secara pembangunan ekonomi'. Dimana Peneliti melihat China telah aktif dalam mendukung perekonomiannya, dengan berbagai investasi China dengan Belt and Road sebagai platform-nya. Pertumbuhan ekonomi China juga terlihat dari kenaikan GDP China, pandangan komunitas internasional terhadap China (terbuka dalam

hubungan kerjasama), kesejahteraan masyarakat China. Menurut data, China telah mampu menggandakan PDB per kapita 2010 (mendekati \$10.000) pada sekitar tahun 2020 dan menyelesaikan urbanisasi (lebih dari 1 miliar orang, kira-kira 75 persen dari populasi China) selama dekade berikutnya. "Modernisasi" berarti China membangun kembali posisinya sebagai pemimpin dunia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta dalam ekonomi dan bisnis; kebangkitan peradaban, budaya, dan kekuatan pertahanan China; dan China berpartisipasi dalam semua bidang usaha manusia.

Kerja sama yang tercipta suatu hubungan 'kemitraan startegis' antara China-Djibouti, telah menjadi salah satu perwujudan China terhadap Chinese Dream, geostrategis yang dimiliki oleh Djibouti telah membentuk China sebagai aktor dalam pemain global yang menduduki wilayah Afrika, khususnya Djibouti dengan hubungan yang menghasilkan sebuah win-win solution. Hal tersebut juga tercermin dalam China's Foreign Policy yang telah dibahas pada sub bab sebelum nya, dimana China sangat mengedepan kan kesejahteraan negara-negara berkembang atau South-South Cooperation, hal ini sejalan dengan tujuan awal China (*Chinese Dream*) yang menyatakan bahwa China tidak hanya mengedepankan kemakmuran masyarakatnya melainkan juga kesejahteraan orang-orang dari semua negara di dunia.

Kedua, 'peningkatan kemampuan militer'. Dimana Peneliti melihat bahwasannya, China sebagai negara Rising Power memiliki berbagai kepentingan dan sedang giat-giat nya dalam pembangunan. Sehingga, tidak heran bila terdapat peningkatan anggaran militer yang terlihat jelas dari negara tirai bambu ini. Menurut data dikatakan bahwa, anggaran belanja China telah menduduki peringkat kedua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat.

Ketiga, 'global dan sejarah'. Disini Peneliti melihat, bahwa *Chinese Dream* negara Tirai bambu tersebut, mencakup perkembangan politik dari Teori Deng Xiaoping (bapak reformasi ekonomi China), yang mengorientasikan kembali China dari perjuangan ideologis ke pembangunan ekonomi, melalui dua generasi terobosan kepemimpinan, yang memodernisasi the *Communist Party of China* (CPC) dan menangani masalah-masalah kontemporer yang kompleks, hingga ke tangan Presiden Xi Jinping, yang semuanya meliputi "Mimpi China". Saat Deng Xioping memulai reformasi dan keterbukaan ekonomi, impian China Xi berkembang bagi rakyat China sebagai bangsa

yang kuat, lebih percaya diri, dan kehidupan yang lebih bahagia dan lebih kaya. Implementasi atas hal ini adalah keterbukaan China dalam menjalankan operasional perekonomiannya dengan Djibouti.

KESIMPULAN

Lanskap strategis internasional sedang mengalami perubahan besar, dimana dinamika global telah menyebabkan kekuatan internasional semakin cepat, seperti; globalisasi ekonomi, masyarakat informasi dan diversifikasi budaya yang berkembang. Perubahan tersebut juga membawa kekuatan pasar negara semakin berkembang, serta konfigurasi kekuatan strategis menjadi lebih seimbang. Mengejar perdamaian, stabilitas dan pembangunan telah menjadi aspirasi universal masyarakat internasional dengan kekuatan perdamaian. Dinamika global turut mengubah kebijakan luar negeri suatu negara dalam kancah internasional. Persaingan dan kerjasama telah menjadi suatu persoalan dalam sistem internasional yang tidak dapat dihindari.

China memainkan peran aktif di panggung global, kemajuan China sebagai negara *rising power* telah mampu membawa perubahan pada strategi kebijakan luar negeri Beijing. Seiring dengan pergeseran kekuatan global dan difusi kekuatan yang menuntut bentuk kerjasama sebagai aspek penting dalam pembangunan, maka China memperluas sayap nya dengan membentuk kemitraan dengan beberapa negara sebagai respon atas pemenuhan kepentingan nasional negara. China giat dalam membangun hubungan kerjasama nya, hal tersebut juga telah menjadi tujuan utama dalam kebijakan luar negeri China. Dimana pada *defense white paper* China yang dikeluarkan pada 2019 dengan judul “China’s

China memainkan peran aktif di panggung global, kemajuan China sebagai negara *rising power* telah mampu membawa perubahan pada strategi kebijakan luar negeri Beijing. Seiring dengan pergeseran kekuatan global dan difusi kekuatan yang menuntut bentuk kerjasama sebagai aspek penting dalam pembangunan, maka China memperluas sayap nya dengan membentuk kemitraan dengan beberapa negara sebagai respon atas pemenuhan kepentingan nasional negara. China giat dalam membangun hubungan kerjasama nya, hal tersebut juga telah menjadi tujuan utama dalam kebijakan luar negeri China. Dimana pada *defense white paper* China yang dikeluarkan pada 2019 dengan judul

“China’s National Defense in the New Era”, Xi Jinping telah memupuk tipe baru hubungan internasional dan membangun “*Community of Common Destiny*” yang merupakan tujuan utama kebijakan luar negeri China.

China mengejar dunia yang ideal, dimana segala bentuk kebijakan mengatur untuk kebaikan bersama, menghormati prinsip-prinsip bertetangga yang baik dan harmoni dalam hubungan dengan semua negara lain, dan menganjurkan kerja sama dan saling membantu. Berakar dalam dalam budaya China, keyakinan kuat inilah yang menginspirasi kerja sama pembangunan China. Menjunjung tinggi keyakinan bahwa semua negara adalah anggota negara global dengan masa depan bersama, China menganjurkan hubungan internasional yang lebih adil dan lebih stabil, dan dengan teguh berkontribusi pada pembangunan global.

Kemudian, peneliti membagi Chinese Dream dalam beberapa sudut pandang peneliti:

1. **Pertama**, ‘secara pembangunan ekonomi’. Dimana Peneliti melihat China telah aktif dalam mendukung perekonomiannya, dengan berbagai investasi China dengan *Belt and Road* sebagai platform-nya.
2. **Kedua**, ‘peningkatan kemampuan militer’. Dimana Peneliti melihat abhwasannya, China sebagai negara *Rising Power* memiliki berbagai kepentingan dan sedang giat-giat nya dalam pembangunan. Sehingga, tidak heran bila terdapat peningkatan anggaran militer yang terlihat jelas dari negara tirai bambu ini.
3. **Ketiga**, ‘global dan sejarah’. Disini Peneliti melihat, bahwa *Chinese Dream* negara Tirai bambu tersebut, mencakup perkembangan politik dari Teori Deng Xiaoping (bapak reformasi ekonomi China), yang mengorientasikan kembali China dari perjuangan ideologis ke pembangunan ekonomi, melalui dua generasi terobosan kepemimpinan, yang memodernisasi *the Communist Party of China* (CPC) dan menangani masalah-masalah kontemporer yang kompleks, hingga ke tangan Presiden Xi Jinping, yang semuanya meliputi "Mimpi China". CPC adalah satu-satunya partai yang berkuasa di China dan mengizinkan berdirinya delapan partai dan membentuk front untuk kedelapan partai dan berada di bawah pembinaan Partai Komunis.

DAFTAR PUSTAKA

- Baldwin, David A., (1993). *Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate*. Columbia University Press.
- Brands, Hal. (2021). *Djibouti Is a Flashpoint in the U.S.-China Cold War*. Accessed on <https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-02-26/djibouti-is-africa-s-flashpoint-in-the-u-s-china-cold-war>. 1 March 2022
- Broadman, H. (2007). *Africa's Silk Road: China and India Economic Frontier*. Washington: World Bank.
- Brzezinski, Zbigniew. (1997). *The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperative*. New York: Basic Books.
- Burchill, Scott dan Linklater, Andrew. (2009). *Teori-Teori Hubungan Internasional*. Nusa Media: Bandung.
- Buzan, Barry. Charles Jones. Richard Liile. (1993). *The Logic of Anarchy: Neorealism to Structural Realism*. New York: Columbia University Press.
- Cabestan, Jean-Pierre. (2019). *China's Military Base in Djibouti: A Microcosm of China's Growing Competition with the United States and New Bipolarity*. *Journal of Contemporary China*. P. 10.
- Caixin. (2018). *Chart of the Day: China's Investment in Africa* (Online). Accessed on <https://www.caixinglobal.com/2018-09-04/chart-of-the-day-chinasinvestment-in-africa-101322391.html>. 1 Desember 2021
- Center for Strategic and International Studies. *How Will the Belt and Road Initiative Advance China's Interests?* Accessed on <https://chinapower.csis.org/china-belt-and-road-initiative/>. 30 November 2021.
- Chevalier, Jean-Marie. (2009). *"The New Energy Crisis" dalam The New Energy Crisis: Climate, Economics and Geopolitics*. New York: Palgrave Macmillan.
- China.cn.org, Xi Jinping's report at 19th CPC National Congress [in Chinese], November 6, 2019. Accessed on [www.china.org.cn /chinese/2017-11/06/content_41852215.htm](http://www.china.org.cn/chinese/2017-11/06/content_41852215.htm). 06 March 2022
- China's Evolving Role in African Security', *Strategic Comments*, vol. 24(1), February 2018, p. 5.
- China's National Defense. *Principles of China's Foreign Policy*. Information Office of the State Council Of the People's Republic of China. July 1998, Beijing.
- Chinese Government Portal. *Administrative divisions of the People's Republic of China*. Accessed on http://www.gov.cn/test/2005-06/15/content_18253.htm. 24 February 2022.
- Chinese President Xi Jinping's speech at opening ceremony of 2018 FOCAC Beijing Summit (1)," *Xinhua*, September 3, 2019. Accessed on www.xinhuanet.com/english/2018-09/03/c_137441987.htm. 06 March 2022.
- Cirlig, Carmen-Cristina. (2012). *EU Strategic Partnerships with Third Countries*. Library of the European Parliament. Library Briefing. P. 4
- Daly, Jhon C.K. (2018). *Geostrategic position draws foreign powers to Djibouti*. Accessed on <https://theArabweekly.com/geostrategic-position-draws-foreign-powers-djibouti>. 27 February 2022.

Degang Sun and Yahia H. Zoubir. (2016). The Eagle's Nest in the Horn of Africa: US Military Strategic Deployment in Djibouti. *Africa Spectrum* 51, no. 1 (2016): 111–24. Accessed on <https://journals.sub.uni-hamburg.de/>. 27 February 2022.